

BAB II**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAN PEMERINTAH**

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018 menguraikan tentang hasil Capaian Target pada RKPD 2017, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi****1. Letak, Luas dan Batas Wilayah**

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 8.997 km² atau sekitar 5,85% dari luas Kalimantan Tengah (153.564 km²). Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah khatulistiwa, yaitu antara 10° sampai 0° Lintang Selatan dan 110° sampai 120° Bujur Timur.

2. Kondisi Topografi

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari:

- a. Bagian Utara, yang merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 50-100 m dari permukaan air laut, yang mempunyai sudut elevasi 8°-15°, serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan ± 15° -25°
- b. Bagian Selatan, terdiri atas pantai/pesisir, rawa dengan ketinggian 0-5 m dari permukaan laut dengan elevasi 0°-8° serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar. Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai besar, yaitu Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau.

Ketinggian wilayah Kabupaten Pulang Pisau bervariasi antara 0 – 100 meter dari permukaan laut. Ada 6 (enam) kecamatan yang terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter di atas permukaan air laut (dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Sebangau Kuala, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Maluku, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Jabiren Raya. Dua kecamatan lainnya berada pada ketinggian 25 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tinggi Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)
1	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	0-25
2	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	0-25
3	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	0-25
4	Maliku	Maliku Baru	0-25
5	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	0-25
6	Jabiren Raya	Jabiren	0-25
7	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	25-50
8	Banama Tingang	Bawan	50-100

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2016

3. Geologi dan Tanah

Berdasarkan peta *geologi* formasi geologi yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, tersusun atas formasi aluvium *Qa) yang terbentuk sejak zaman Holosen dan formasi Batuan Api (Trv). Formasi Aluvium (Qa) merupakan formasi yang tersusun dari bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapan sungai dan rawa. Sementara formasi Batuan Gunung Api (Trv) merupakan formasi yang tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit,

basal dan rijang. Bahan-bahan ini terkumpul dengan basal yang berwarna coklat kemerahan.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau juga mengikuti pola kondisi topografinya. Di bagian Selatan, jenis tanah yang dominan adalah tanah gambut dan tanah aluvial, terutama pada bagian Selatan Kabupaten Pulang Pisau yang kondisi drainasenya kurang bagus. Sedangkan jenis tanah yang ada di bagian utara didominasi tanah podsoil dan aluvial. Pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai

4. Hidrologi

Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai. Sungai yang termasuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu :

- Sungai Kahayan dengan panjang ± 600 km;
- Sungai Sebangau dengan panjang ± 180 km;
- Sungai Anjir Kalampan dengan panjang $\pm 14,6$ km, yang menghubungkan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat (Kabupaten Kapuas) dan Pulang Pisau mengarah ke Palangka Raya. Sungai Anjir Kalampan yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang $\pm 6,5$ km;
- Sungai Anjir Basarang dengan panjang ± 24 km, menghubungkan Kuala Kapuas (Kabupaten Kapuas) dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sungai Anjir Basarang yang masuk Wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang ± 7 km;
- Sungai Terusan Raya dengan panjang ± 18 km yang menjadi jalur transportasi sungai dari Kuala Kapuas ke Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala melalui Terusan Batu. Sungai Terusan Raya yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang ± 6 km;

- Daerah pantai / pesisir Laut dengan bentangan pantai sepanjang \pm 153,4 km dari timur ke barat.

Tabel 2.2 Nama Sungai Menurut Panjangnya di Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Sungai/Anak Sungai	Panjang (km)
1	Sungai Kahayan	626,00
2	Sungai Sebangau	180,00
3	Sungai Anjir Kalampan	6,50
4	Sungai Anjir Basarang	7,00
5	Sungai Terusan Raya	6,00

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2016

5. Klimatologi

Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah yang beriklim tropis dengan kelembaban yang cukup tinggi, suhu udara berkisar antara $26,5^{\circ}\text{C}$ – $27,5^{\circ}\text{C}$ dengan suhu rata-rata maksimum $32,5^{\circ}\text{C}$ dan minimum $22,9^{\circ}\text{C}$. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Pulang Pisau rata-rata mendapat penyinaran matahari diatas 50%. Berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975), tipe iklim wilayah Kabupaten Pulang Pisau termasuk tipe iklim B1, yaitu wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7 – 9 bulan (curah hujan > 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan < 100 mm/bulan kurang dari 2 bulan. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober - Desember serta Januari - Maret yang berkisar antara 2.000 – 3.500 mm setiap tahun, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni – September.

6. Potensi Pengembangan Wilayah

Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan dan Lahan Areal Non Hutan mengacu kepada Surat keputusan Nomor 529/Menhut-II/2012 dengan rincian pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Luas Kawasan Hutan dan Non Hutan Kabupaten Pulang Pisau

No	Nomenklatur	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	HL	217.001,94	20,96
2	KSA/KPA	254.260,85	24,56
3	HP	284.960,03	27,52
4	HPT	18.030,43	1,74
5	HPK	68.441,73	6,61
6	APL	179.844,91	17,37
7	Badan Air	12.898,34	1,25
	Total	1.035.438,23	100,00

Sumber : SK Menhut No.529/Menhut-II/2012

7. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan.

a. Gambaran Umum Penduduk Pulang Pisau

Pada tahun 2015 penduduk Kabupaten Pulang Pisau berjumlah 124.845 jiwa, yang terdiri atas 64.939 laki-laki dan 59.906 perempuan. Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Maluku adalah dua kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 27.460 jiwa dan 23.760 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau sekitar 8.997 Km² yang didiami oleh 124.845 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pulang Pisau adalah sebanyak 13,88 orang per kilometer persegi. Dilihat dari distribusi penduduk menurut kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Kahayan Hilir yaitu 76,28 penduduk per km², diikuti Kecamatan Maluku sebanyak 57,51 penduduk per km². Sementara kecamatan dengan kepadatan terendah kecamatan adalah Sebangau Kuala, hanya 2,15 penduduk per km². (Lihat Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per (Km ²)
1	Kahayan Kuala	1.155,00	20.508	17,76
2	Sebangau Kuala	3.801,00	8.156	2,15
3	Pandih Batu	535,86	20.487	38,23
4	Maliku	413,14	23.760	57,51
5	Kahayan Hilir	360,00	27.460	76,28
6	Jabiren Raya	1.323,00	8.103	6,12
7	Kahayan Tengah	783,00	7.661	9,78
8	Banama Tingang	626,00	8.710	13,91
JUMLAH TOTAL		8.997,00	124.845	14,00
Tahun 2014			124.015	
Tahun 2013			123.278	

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2016

b. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Pulang Pisau

Penduduk Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari laki-laki 64.939 jiwa dan perempuan 59.906 jiwa dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 108,40. Dengan demikian, terdapat 108 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan, dan kepadatan penduduk (*density*) mencapai 14 jiwa per km². (Tabel 2.5)

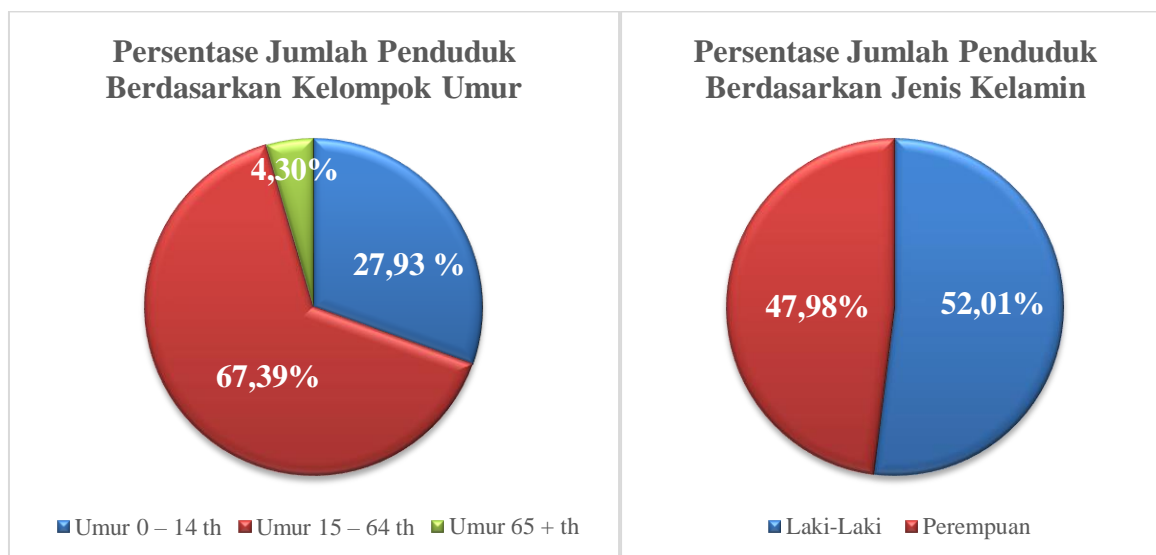
Dilihat dari kelompok umur selama tahun 2015, usia produktif (15 – 64 tahun) masih mendominasi rata-rata sebesar 67,39%, sedangkan usia 0 – 14 tahun mencapai 27,93% dan penduduk usia lebih dari 65 tahun sekitar 4,30%. Kepadatan penduduk dan jumlahnya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2015 (Tabel 2.5 dan Bagan 2.1)

Tabel 2.5 **Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2015**

Tahun		Kelompok Umur			Jenis Kelamin			Jumlah	Kepadatan Penduduk
		0 – 14	15 – 64	65 +	Laki-Laki	Perempuan	Rasio		(Jiwa/km ²)
2015	Jiwa	34.881	84.134	5.830	64.939	59.906	108,40	124.845	14
	%	27,93	67,39	4,30	52,01	47,98		100,00	

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2016, diolah

Bagan 2.1 **Persentase Penduduk Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015.**



Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2016, diolah

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Pulang Pisau, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Pada

bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, inflasi, perkembangan PDRB per kelompok sektor, pendapatan per kapita; produktifitas tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan, dan gambaran singkat sektor.

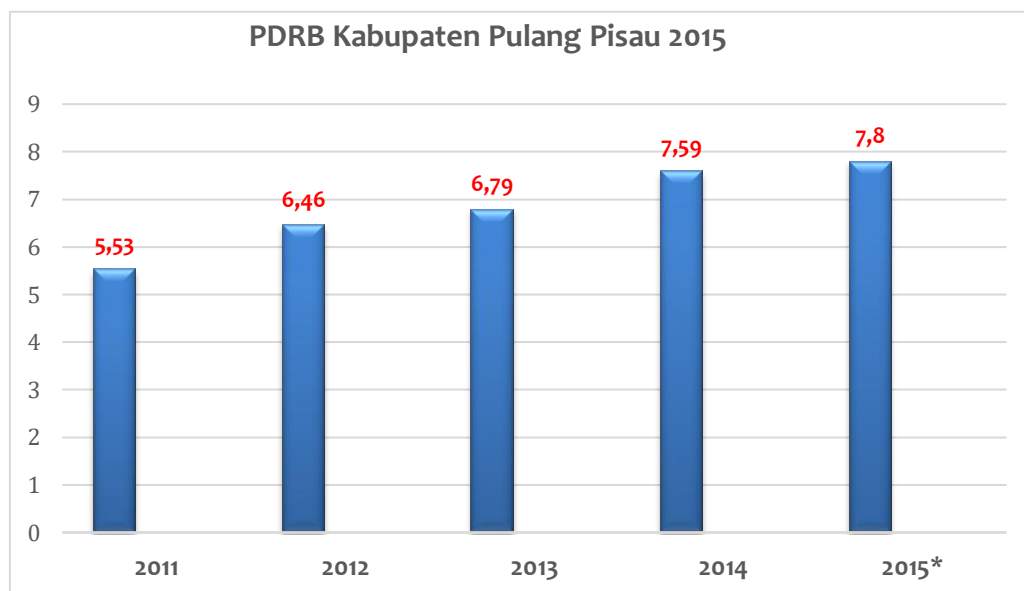
a. Pertumbuhan PDRB Regional

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambarkan melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin.

Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca krisis global tahun 2008, perekonomian Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2011-2015 tumbuh relatif stabil dan menunjukkan tren meningkat.

Bagan 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011-2015



Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2016

*) data bersifat sementara

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2015 sebesar 7,80%. Sumbangan terbesar PDRB tahun 2015 atas dasar Harga Berlaku adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar Rp 1.434.976,9 juta dan atas dasar Harga Konstan (tahun 2010) sebesar Rp 1.012.178,9 juta. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2011 - 2015 berfluktuasi dan ada kecenderungan meningkat dari 5,53 % menjadi 7,80%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2011 - 2015 tingkat perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau terus meningkat setiap tahun.

b. Pertumbuhan PDRB Sektoral

Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. PDRB ada dua macam, yaitu PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Konstan.

PDRB Kabupaten Pulang Pisau dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2011 dan 2015 dilihat dari laju pertumbuhan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.6, Tabel 2.7, dan Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)

No	Sektor	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	867.220,34	991.469,02	1.137.551,51	1.329.413,33	1.434.976,91
2	Petambangan dan Penggalian	10.987,78	12.598,95	14.259,73	16.186,64	18.798,39
3	Industri Pengolahan	154.532,52	172.269,58	198.344,15	237.659,16	314.573,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	862,50	875,25	883,10	1.049,25	1.958,31
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah	1.471,33	1.611,84	1.774,80	2.049,01	2.282,99
6	Konstruksi	312.343,74	372.507,48	447.885,35	527.787,67	586.242,41
7	Perdagangan dan Resparasi Mobil	231.044,32	252.172,15	280.127,12	321.714,21	366.374,02
8	Transportasi dan Pergudangan	106.324,10	118.876,68	130.507,71	143.001,17	159.029,74
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	65.995,13	74.629,42	85.420,01	97.535,75	114.444,72
10	Informasi dan Komunikasi	29.718,92	32.365,41	37.116,57	43.353,28	48.179,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	16.053,61	17.204,32	18.799,92	21.780,09	23.935,85
12	Real Estate	40.277,84	43.222,70	47.469,69	54.408,78	63.441,17
13	Jasa Perusahaan	1.767,43	1.849,88	2.022,22	2.036,70	2.457,72
14	Administrasi Pemerintahan	103.786,10	118.348,40	137.246,10	159.775,11	195.740,79
15	Jasa Pendidikan	158.877,08	171.325,82	181.932,96	196.100,85	228.514,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59.655,35	69.485,64	67.878,75	75.594,22	98.382,06
17	Jasa Lainnya	16.610,51	18.544,42	21.334,61	24.185,17	27.947,84
PDRB		2.177.528,62	2.469.356,95	2.810.554,30	3.253.630,39	3.687.280,90

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2016

*) Angka bersifat sementara

Analisis atas dasar harga berlaku (ADHB) berguna untuk mengetahui situasi perekonomian jangka pendek, misalnya pengaruh harga pada tahun tertentu. Dari

pengamatan terhadap PDRB ADHB selama periode 2011-2015 pada masing-masing sektor (Tabel 2.6), terlihat bahwa nilai sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selalu terbesar dibandingkan dengan nilai sektor lainnya. Nilai sektor ADHB terbesar kedua pada tahun 2015 adalah sektor konstruksi. Sedangkan nilai terendah ADHB pada tahun 2015 adalah sektor pengadaan listrik dan gas.

Tabel 2.7 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)

No	Sektor	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	807.337,67	853.810,12	908.882,39	986.707,97	1.012.178,89
2	Petambangan dan Penggalian	10.352,28	11.223,94	12.072,81	12.945,58	13.900,46
3	Industri Pengolahan	148.966,52	156.051,18	168.676,33	184.319,28	235.854,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	917,21	961,99	1.036,76	1.185,44	1.678,14
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah	1.362,48	1.460,00	1.586,74	1.669,80	1.814,35
6	Konstruksi	295.304,78	328.579,98	366.946,01	399.160,90	429.288,48
7	Perdagangan dan Resparasi Mobil	216.389,51	228.848,49	241.507,97	257.754,18	279.614,82
8	Transportasi dan Pergudangan	98.802,01	102.544,94	105.667,62	108.966,67	112.350,27
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	61.441,52	64.994,00	68.807,63	74.707,85	81.727,52
10	Informasi dan Komunikasi	29.572,56	32.204,90	35.230,92	38.459,63	42.255,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	15.214,77	15.778,20	16.368,76	17.597,05	18.511,35
12	Real Estate	39.150,44	39.884,34	41.382,84	44.361,73	49.104,65
13	Jasa Perusahaan	1.733,69	1.761,03	1.884,92	1.817,89	1.952,61
14	Administrasi Pemerintahan	95.795,39	102.804,79	110.783,20	120.998,43	139.697,02
15	Jasa Pendidikan	148.482,68	154.822,54	161.601,41	168.149,26	178.767,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56.132,17	62.073,98	60.013,81	62.987,08	73.338,08
17	Jasa Lainnya	15.934,82	17.054,08	18.353,50	19.813,55	21.849,00
PDRB		2.042.890,52	2.174.858,50	2.320.803,61	2.501.602,28	2.693.884,24

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2016

*) Angka bersifat sementara

Analisis atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 memberikan gambaran mengenai pola perkembangan secara riil dan bermanfaat untuk memperkirakan kecenderungan perkembangan PDRB di masa mendatang. Dari pengamatan terhadap PDRB ADHK 2010 selama kurun waktu 2011-2015 pada masing-masing sektor (Tabel 2.7), terlihat bahwa nilai sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selalu terbesar dibandingkan dengan nilai sektor lainnya. Nilai sektor ADHK 2010 terbesar kedua pada tahun 2015 adalah sektor konstruksi. Sedangkan nilai terendah ADHK 2010 pada tahun 2015 adalah sektor pengadaan listrik dan gas.

Tabel 2.8 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015

No	Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,73	5,76	5,87	6,23	5,41
2	Petambangan dan Penggalian	6,92	8,42	7,63	6,92	7,62
3	Industri Pengolahan	4,70	4,76	15,06	15,59	13,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,93	4,88	8,47	12,23	43,30
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah	1,10	7,16	8,29	6,06	8,20
6	Konstruksi	10,36	11,27	9,69	9,48	8,80
7	Perdagangan dan Resparasi Mobil	5,82	5,76	5,22	8,56	6,97
8	Transportasi dan Pergudangan	0,64	3,79	2,61	3,39	3,27
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,34	5,78	6,24	8,31	9,28
10	Informasi dan Komunikasi	6,46	8,90	9,74	9,40	9,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,06	3,70	5,01	6,77	4,65
12	Real Estate	5,29	1,87	4,56	7,62	9,41
13	Jasa Perusahaan	2,57	1,58	3,55	-0,73	7,87
14	Administrasi Pemerintahan	7,86	7,32	7,67	9,22	15,56
15	Jasa Pendidikan	8,78	4,27	5,24	3,81	5,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,70	10,59	-0,90	2,93	15,83
17	Jasa Lainnya	6,84	7,02	7,90	8,28	9,65
PDRB		5,53	5,79	7,43	7,83	11,31

Sumber: Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pulang Pisau 2016

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2015 terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 43,30%, diikuti oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 15,83% dan sektor administrasi pemerintahan sebesar 15,56%. Total perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2011 – 2015 meningkat dari 5,53% menjadi 11,31%.

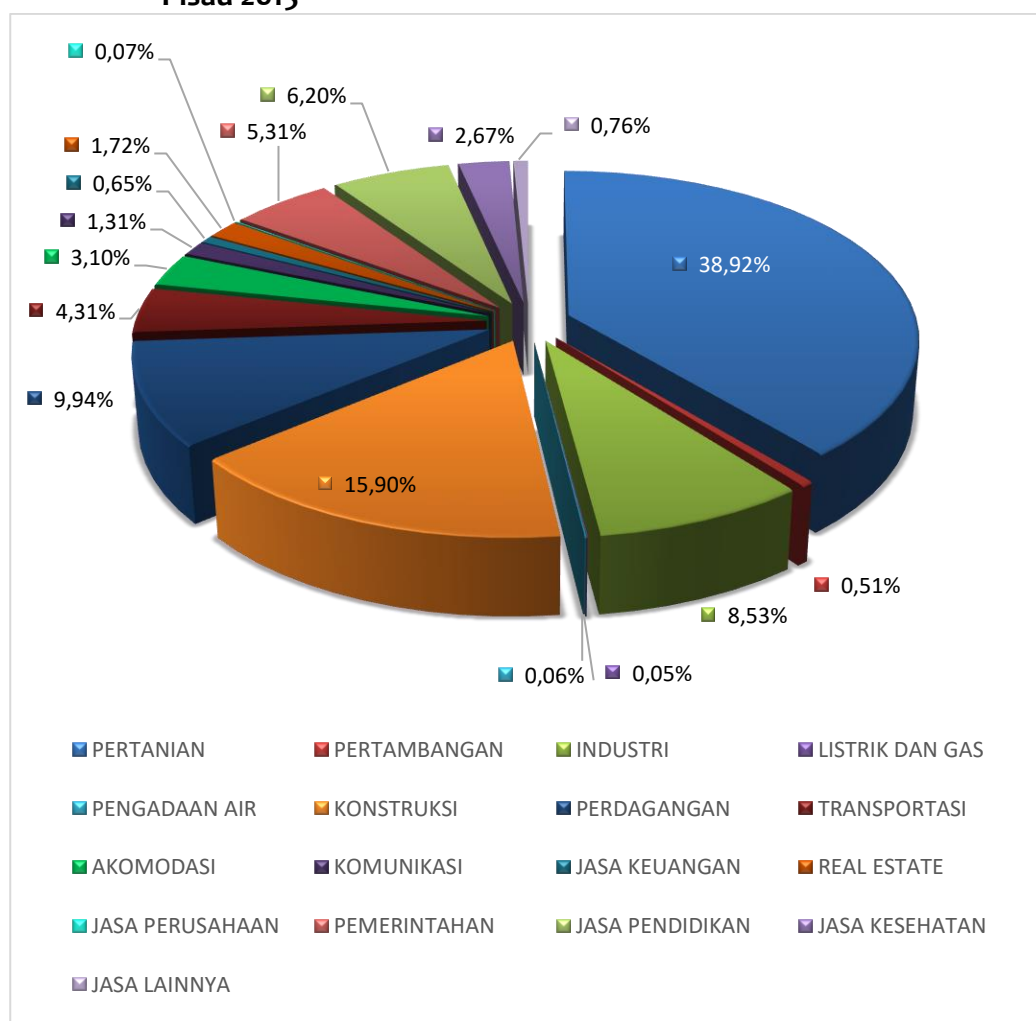
c. Struktur Perekonomian

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat dari suatu sektor ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor terhadap PDRB. Perekonomian Indonesia sendiri telah mengalami pergerakan/pergeseran struktur selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari peranan sektor pertanian sebagai penggerak utama

perekonomian nasional mulai digeser peranannya oleh sektor industri pengolahan.

Namun hal ini tidak berlaku untuk Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Pulang Pisau, justru sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dan menjadi andalan utama dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB.

Bagan 2.3 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulang Pisau 2015



Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2011-2015 (diolah)

Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan sektor yang mempunyai peranan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pulang Pisau tahun 2015, yaitu sebesar 38,92%. Kemudian sektor konstruksi sebesar 15,90%, sektor perdagangan sebesar 9,94%, dan sektor industri

sebesar 8,53%. Sektor jasa pendidikan 6,20%, sektor administrasi 5,31%, sektor transportasi sebesar 4,31%, sektor akomodasi 3,10% dan sektor yang paling sedikit dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau tahun 2015 yaitu sektor pengadaan listrik 0,05%.

d. Inflasi

Selama Februari 2017, Kota Palangka Raya terjadi inflasi sebesar 0,27 persen atau mengalami kenaikan indeks harga dari 124,40 di Januari 2017 menjadi 124,74 di Februari 2017. Pada bulan yang sama, Kota Sampit juga mengalami inflasi sebesar 0,27 persen dengan kenaikan indeks harga dari 128,14 di Januari 2017 menjadi 128,49 di Februari 2017.

e. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah dengan kata lain semakin tinggi/besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur daerah tersebut.

PDRB per kapita dapat diukur menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Tabel 2.9 PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 - 2015

Tahun	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (rupiah)
2013	22.838.448,06	18.840.627,69
2014	26.137.462,40	20.150.510,83
2015	29.534.870,44	21.577.830,11

Sumber: Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pulang Pisau 2016

PDRB per kapita adalah salah satu pendekatan untuk pendapatan per kapita. Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2013 - 2015 cenderung meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010, yaitu untuk nilai atas dasar harga berlaku dari Rp. 22.838.448,06 (tahun 2013)

menjadi Rp. 29.534.870,44 (tahun 2015) dan untuk nilai atas dasar konstan 2010 dari Rp. 18.840.627,69 (tahun 2013) menjadi Rp 21.577.830,11 (tahun 2015). PDRB per kapita yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan gambaran bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Pulang Pisau.

2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Identifikasi/pemahaman tentang kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari berbagai macam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Jika diperhatikan pada Tabel 2.10, selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, IPM Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan peningkatan, yakni dari 64,76% pada tahun 2013 meningkat menjadi 65,76% pada 2015. Meskipun memiliki trend meningkat, namun IPM Kabupaten Pulang Pisau jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah ataupun dengan rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Tengah adalah yang paling rendah nomor dua setelah Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2013-2015. Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau belumlah maksimal.

Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah Tahun 2013-2015

No	Wilayah	2013	2014	2015
1	Kotawaringin Barat	69.51	70.14	70.60
2	Kotawaringin Timur	67.95	68.45	68.61
3	Kapuas	64.82	65.29	66.07
4	Barito Selatan	66.20	66.61	68.27
5	Barito Utara	65.12	66.30	67.38
6	Sukamara	63.92	64.44	65.80
7	Lamandau	67.23	67.53	68.30
8	Seruyan	62.81	63.49	64.77
9	Katingan	65.29	65.79	66.81
10	Pulang Pisau	64.76	65.00	65.76
11	Gunung Mas	67.75	68.13	69.24
12	Barito Timur	68.82	69.12	69.71
13	Murung Raya	65.62	66.10	66.46
14	Kota Palangka Raya	78.02	78.50	78.62
15	KALTENG	67.41	67,49	68,31

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2016

b. Kesehatan

Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain pendidikan dan ekonomi.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2015 sebesar 67,64 tahun yang artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Pulang Pisau akan mencapai umur 67,64 tahun.

c. Pendidikan

Angka melek huruf penduduk Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2012 cenderung meningkat dari 96,23% menjadi 96,71% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar di Kabupaten Pulang Pisau telah memberikan kontribusi dalam mengurangi angka buta huruf selama tahun 2012-2015. Salah satu keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan

semakin berkurangnya tingkat buta huruf penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Kemampuan membaca dan menulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai hidup sejahtera. Berkaitan dengan itu, pemerintah berusaha agar penduduk terbebaskan dari buta aksara.

Usaha pemerintah selama ini antara lain diwujudkan dengan program wajib belajar 12 tahun dan program kejar Paket A dan B. Sejalan dengan program Pemerintah Pusat yaitu Wajib Belajar 12 tahun dan sebagai upaya mengurangi tingkat angka buta huruf. Untuk menunjang Program Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2022 yaitu KALTENG BERKAH maka Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus berinovasi dalam mengembangkan program-program unggulan daerah yang menasar pada desa-desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan tujuan untuk memberikan stimulus dalam bentuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari SOPD-SOPD terkait yang bertujuan untuk percepatan penyediaan sarana dan prasarana disegala sektor sebagai upaya pemerataan pembangunan desa sasaran tersebut.

Salah satu faktor penting yang menjadi satunya adalah pengembangan sektor Pendidikan. Hal ini dapat terlihat dengan meningkatnya perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 103,61% pada 2012 menjadi 109,92% pada 2015, APK SMP/MTs 81,03% pada 2012 menjadi 106,26% pada tahun 2015, serta APK SMA/MA 56,64% pada 2012 menjadi 86,52% pada tahun 2015, demikian juga pada tingkat persentase Angka Partisipasi Murni (APM) dimana APM SD/MI 90,34% pada 2012 menjadi 95,12% pada tahun 2015, APM SMP/MTs 66,99% pada 2012 menjadi 76,32% pada 2015, serta APM SMA/MA 42,92% pada 2012 menjadi 64,58% pada tahun 2015.

d. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 sebesar 2,40% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 4,28% kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 3,29%. Hal ini menunjukkan beberapa program dan kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan berkontribusi secara langsung dalam menurunkan angka Pengangguran Terbuka pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014.

e. Kondisi Kemiskinan

Selama Tahun 2013-2015 di Kabupaten Pulang Pisau terjadi peningkatan persentase penduduk miskin dari 5,45% pada tahun 2013 menjadi 5,65% pada tahun 2015. Hal ini tentunya memerlukan keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan dalam upaya menekan atau menurunkan angka kemiskinan sebagaimana target RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum mencakup pelayanan dasar dan pelayanan penunjang. Kondisi pelayanan dasar dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang yakni bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan. Sedangkan kondisi

pelayanan penunjang dapat diketahui dari beberapa bidang yakni penanaman modal, UMKM, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KB dan KS, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemuda dan olah raga.

1. Pelayanan Dasar

a) Jalan dan Angkutan Darat

Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Berdasarkan data BPS tahun 2014-2015 dapat diketahui kondisi jalan dan status jalan sebagai saran pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Kabupaten Pulang Pisau.

Tabel 2.11 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Status Jalan di Kabupaten Pulang Pisau (km) tahun 2014-2015

Jenis Permukaan	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Baik	119,05	119,05	97,00	97,00	381,36	405,39
Sedang	0,00	0,00	40,00	40,00	354,95	372,92
Rusak	0,00	0,00	30,00	30,00	418,01	420,74
Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah (km)	119,05	119,05	167,00	167,00	1.154,32	1.199,05

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2016

Dari tabel, diketahui panjang jalan di Kabupaten Pulang Pisau dalam kondisi baik adalah 119,50 km untuk jalan negara, 97 km untuk jalan provinsi, dan 405,39 km untuk jalan kabupaten. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa pada tahun 2015 untuk jalan negara sebanyak 100% jalan dalam kondisi baik. Sedangkan untuk jalan provinsi sebanyak 58,08% dalam kondisi baik. Sementara itu, untuk jalan kabupaten hanya sebanyak 33,80% dari panjang jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik. Semakin tinggi nilai proporsi panjang jaringan jalan akan memberikan dampak yang baik bagi penduduknya ataupun bagi daerah itu sendiri. Pembangunan wilayah akan terhambat

karena tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai/dipengaruhi oleh akses jaringan jalan yang rusak

b) Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran untuk kebutuhan budidaya pertanian. Data mengenai jaringan irigasi saat ini yang dimiliki kurang lengkap untuk menggambarkan rasio jaringan irigasi. Meskipun demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari tingkat PDRB, semakin tinggi tingkat PDRB per kapita maka semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan harga konstan 2010 mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Pada tahun 2011 PDRB ADHK Kabupaten Pulang Pisau hanya sebesar 2.042.890,5 Juta Rupiah meningkat menjadi 2.693.884,2 Juta Rupiah pada tahun 2015

2. Iklim Berinvestasi

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan. Mengingat penerbitan ijin investasi untuk PMA merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat sehingga Kabupaten Pulang Pisau hanya menerbitkan ijin investasi untuk PMDN. Sampai dengan Tahun 2016 ini sebanyak 23 ijin investasi telah diterbitkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di Kabupaten Pulang Pisau diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi dengan menjaga kelestarian alam terutama investasi yang bergerak ada sektor tambang dan perkebunan kelapa sawit .

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD

Hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2016 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SOPD tahun 2016 dan realisasi Renstra SOPD oleh masing-masing SOPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Sampai dengan tahun 2016, berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator-indikator makro pembangunan daerah menunjukkan trend peningkatan. Pencapaian yang cukup baik terutama dari kinerja pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan tahun 2015 sebesar 7,8 persen. merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten lain di Kalimantan Tengah.

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Secara umum semua program telah dilaksanakan semua SKPD dengan baik dan telah terealisasi dan kinerja yang diharapkan dari terlaksananya program tersebut telah tercapai. Capaian kinerja SOPD Tahun 2016 secara umum dapat dilihat pada tabel 2.12 capaian realisasi serapan anggaran tahun 2016 berikut ini :

Tabel 2.12 Realisasi Serapan Anggaran SOPD Tahun 2016 Per 31 Desember 2016

NO.	SKPD	PAGU APBD (BL+BTL) (Rp)	BELANJA LANGSUNG				BELANJA TIDAK LANGSUNG				REALISASI BL+BTL		
			PAGU BL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	PAGU BTL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	Rp.	Persentase Keuangan	Persentase Fisik
				Rp.	Persentase			Rp.	Persentase				
1	2	3	4	5	6=5/4*1	7	8	9	10=9/8*	11	12=5+9	13=12/3*	14
1	Sekretariat Daerah	34,244,721,233.00	Rp 26,326,723,825.00	Rp 23,835,956,743.00	90.54	93.85	7,917,997,408.00	7,154,218,680.00	90.35	100.00	30,990,175,423.00	90.50	95.27
2	Sekretariat DPRD	15,125,737,276.00	Rp 12,616,858,000.00	Rp 11,784,925,140.00	93.41	100.00	2,508,879,276.00	2,371,264,847.00	94.51	100.00	14,156,189,987.00	93.59	100.00
3	Inspektorat	4,726,515,868.00	Rp 2,919,000,000.00	Rp 2,906,276,850.00	99.56	100.00	1,807,515,868.00	1,699,647,638.00	94.03	100.00	4,605,924,488.00	97.45	100.00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10,687,687,320.45	Rp 8,529,514,650.00	Rp 7,632,264,718.00	89.48	99.58	2,158,172,670.45	2,084,353,749.00	96.58	100.00	9,716,618,467.00	90.91	99.66
5	Badan Lingkungan Hidup	7,090,096,398.82	Rp 4,807,454,000.00	Rp 4,625,097,659.00	96.21	100.00	2,282,642,398.82	2,201,282,810.00	96.44	100.00	6,826,380,469.00	96.28	100.00
6	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	5,850,266,000.00	Rp 3,875,617,000.00	Rp 3,486,462,215.00	89.96	89.96	1,974,649,000.00	1,855,112,834.00	93.95	100.00	5,341,575,049.00	91.30	93.35
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,878,571,006.00	Rp 4,450,000,000.00	Rp 4,066,042,127.00	91.37	91.37	1,428,571,006.00	1,306,936,910.00	91.49	100.00	5,372,979,037.00	91.40	93.47
8	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,719,222,259.00	Rp 5,000,000,000.00	Rp 4,360,216,479.00	87.20	100.00	1,719,222,259.00	1,690,103,374.00	98.31	100.00	6,050,319,853.00	90.04	100.00
9	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	4,902,848,846.00	Rp 3,050,000,000.00	Rp 2,695,765,469.00	88.39	88.39	1,852,848,846.00	1,760,627,595.00	95.02	100.00	4,456,393,064.00	90.89	92.77
10	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	6,439,426,264.00	Rp 4,209,990,000.00	Rp 3,930,737,292.00	93.37	93.37	2,229,436,264.00	2,148,405,967.00	96.37	100.00	6,079,143,259.00	94.41	95.66
11	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	17,383,184,300.00	Rp 10,553,118,500.00	Rp 10,106,697,248.00	95.77	95.77	6,830,065,800.00	6,667,725,534.00	97.62	100.00	16,774,422,782.00	96.50	97.43
12	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,966,363,992.00	Rp 4,275,000,000.00	Rp 3,923,713,491.00	91.78	91.78	1,691,363,992.00	1,595,988,656.00	94.36	100.00	5,519,702,147.00	92.51	94.11
13	Badan Perpustakaan Arsip & Dokumentasi Daerah	3,620,351,216.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,422,302,520.00	96.89	96.89	1,120,351,216.00	1,034,455,338.00	92.33	100.00	3,456,757,858.00	95.48	97.85
14	Dinas Pendidikan	269,421,503,951.40	Rp 27,483,011,140.00	Rp 25,864,937,060.00	94.11	94.11	241,938,492,811.40	220,838,131,899.00	91.28	100.00	246,703,068,959.00	91.57	99.40
15	Dinas Kesehatan	61,678,367,845.82	Rp 40,175,014,395.00	Rp 36,164,408,369.00	90.02	92.09	21,503,353,450.82	20,801,040,859.00	96.73	100.00	56,965,449,228.00	92.36	94.84
16	Dinas Pekerjaan Umum	332,887,692,652.51	Rp 326,725,141,752.87	Rp 309,810,113,189.00	94.82	99.74	6,162,550,899.64	5,986,755,812.00	97.15	100.00	315,796,869,001.00	94.87	99.74
17	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	6,293,346,680.73	Rp 3,903,912,500.00	Rp 3,704,731,872.00	94.90	94.90	2,389,434,180.73	2,230,019,342.00	93.33	100.00	5,934,751,214.00	94.30	96.84
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,708,493,888.00	Rp 4,000,000,000.00	Rp 3,935,076,165.00	98.38	100.00	1,708,493,888.00	1,615,999,010.00	94.59	100.00	5,551,075,175.00	97.24	100.00
19	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi	11,408,288,754.00	Rp 8,852,258,000.00	Rp 8,598,939,983.00	97.14	100.00	2,556,030,754.00	2,460,410,194.00	96.26	100.00	11,059,350,177.00	96.94	100.00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	3,162,317,830.00	Rp 2,250,000,000.00	Rp 2,169,491,755.00	96.42	100.00	912,317,830.00	764,068,162.00	83.75	100.00	2,933,559,917.00	92.77	100.00

NO.	SKPD	PAGU APBD (BL+BTL) (Rp)	BELANJA LANGSUNG				BELANJA TIDAK LANGSUNG				REALISASI BL+BTL		
			PAGU BL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	PAGU BTL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	Rp.	Persentase Keuangan	Persentase Fisik
				Rp.	Persentase			Rp.	Persentase				
21	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14,318,444,613.90	Rp 8,118,294,000.00	Rp 6,622,171,093.00	81.57	100.00	6,200,150,613.90	5,641,784,543.91	90.99	100.00	12,263,955,636.91	85.65	100.00
22	Dinas Pertanian dan Peternakan	15,935,512,462.00	Rp 12,974,642,500.00	Rp 12,576,792,735.00	96.93	100.00	2,960,869,962.00	2,823,604,340.00	95.36	100.00	15,400,397,075.00	96.64	100.00
23	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	14,112,159,129.00	Rp 10,899,237,097.00	Rp 10,165,507,691.00	93.27	100.00	3,212,922,032.00	3,004,340,525.00	93.51	100.00	13,169,848,216.00	93.32	100.00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,794,683,150.00	Rp 2,000,000,000.00	Rp 1,959,362,742.00	97.97	100.00	794,683,150.00	662,889,949.00	83.42	100.00	2,622,252,691.00	93.83	100.00
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	11,642,242,224.00	Rp 9,448,650,000.00	Rp 8,389,232,971.00	88.79	95.16	2,193,592,224.00	2,061,659,698.00	93.99	100.00	10,450,892,669.00	89.77	96.07
26	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	10,163,240,862.00	Rp 8,372,912,000.00	Rp 8,055,803,718.00	96.21	100.00	1,790,328,862.00	1,689,752,265.00	94.38	100.00	9,745,555,983.00	95.89	100.00
27	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	4,276,659,067.82	Rp 2,570,000,000.00	Rp 2,546,489,360.00	99.09	100.00	1,706,659,067.82	1,591,227,361.00	93.24	100.00	4,137,716,721.00	96.75	100.00
28	Rumah Sakit Umum Daerah	31,919,192,652.65	Rp 24,071,760,000.00	Rp 23,290,814,430.24	96.76	96.76	7,847,432,652.65	7,292,401,907.00	92.93	100.00	30,583,216,337.24	95.81	97.55
29	Kantor Kecamatan Kahayan Hilir	2,092,306,738.00	Rp 946,950,000.00	Rp 939,472,262.00	99.21	100.00	1,145,356,738.00	1,120,299,460.00	97.81	100.00	2,059,771,722.00	98.45	100.00
30	Kantor Kecamatan Kahayan Kuala	1,747,521,464.00	Rp 665,000,000.00	Rp 658,795,000.00	99.07	100.00	1,082,521,464.00	1,041,910,696.00	96.25	100.00	1,700,705,696.00	97.32	100.00
31	Kantor Kecamatan Kahayan Tengah	2,186,684,704.00	Rp 606,000,000.00	Rp 603,040,950.00	99.51	100.00	1,580,684,704.00	1,528,113,655.00	96.67	100.00	2,131,154,605.00	97.46	100.00
32	Kantor Kecamatan Maliku	1,945,230,450.00	Rp 656,986,000.00	Rp 655,235,213.00	99.73	100.00	1,288,244,450.00	1,248,751,867.00	96.93	100.00	1,903,987,080.00	97.88	100.00
33	Kantor Kecamatan Banama Tingang	2,078,063,752.10	Rp 616,986,000.00	Rp 575,221,470.00	93.23	93.23	1,461,077,752.10	1,435,189,417.00	98.23	100.00	2,010,410,887.00	96.74	97.99
34	Kantor Kecamatan Pandih Batu	1,932,542,233.60	Rp 656,986,000.00	Rp 653,322,621.00	99.44	100.00	1,275,556,233.60	1,230,558,976.00	96.47	100.00	1,883,881,597.00	97.48	100.00
35	Kantor Kecamatan Jabiren Raya	1,541,061,636.00	Rp 626,986,000.00	Rp 623,334,350.00	99.42	100.00	914,075,636.00	885,877,775.00	96.92	100.00	1,509,212,125.00	97.93	100.00
36	Kantor Kecamatan Sebangau Kuala	1,615,622,490.00	Rp 675,000,000.00	Rp 674,820,000.00	99.97	100.00	940,622,490.00	914,522,934.00	97.23	100.00	1,589,342,934.00	98.37	100.00
37	Kantor Kelurahan Pulang Pisau	802,157,287.90	Rp 222,500,000.00	Rp 201,756,897.00	90.68	90.68	579,657,287.90	540,086,008.00	93.17	100.00	741,842,905.00	92.48	97.41
38	Kantor Kelurahan Kalawa	564,130,038.00	Rp 197,500,000.00	Rp 185,736,145.00	94.04	94.04	366,630,038.00	347,172,366.00	94.69	100.00	532,908,511.00	94.47	97.91
39	Kantor Kelurahan Bereng	688,482,620.00	Rp 197,500,000.00	Rp 196,075,880.00	99.28	100.00	490,982,620.00	469,441,040.00	95.61	100.00	665,516,920.00	96.66	100.00
40	Kantor Kelurahan Bahaur Basantan	562,096,344.99	Rp 197,500,000.00	Rp 196,360,000.00	99.42	100.00	364,596,344.99	351,369,584.00	96.37	100.00	547,729,584.00	97.44	100.00
41	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4,738,067,242.00	Rp -	Rp -	0.00	0.00	4,738,067,242.00	4,355,918,088.00	91.93	100.00	4,355,918,088.00	91.93	100.00
42	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	177,441,494.00	Rp -	Rp -	0.00	0.00	177,441,494.00	151,818,522.00	85.56	100.00	151,818,522.00	85.56	100.00
43	PPKD	101,736,406,783.00	Rp -		0.00	0.00	101,736,406,783.00	98,540,977,815.00	96.86	100.00	98,540,977,815.00	96.86	100.00
JUMLAH		1,048,764,953,020.69	591,224,003,359.87	555,793,501,872.24	94.01	98.12	457,540,949,660.82	427,196,218,001.91	93.37	100.00	982,989,719,874.15	93.73	98.94

2.3. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau

Permasalahan pembangunan daerah adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan Kabupaten Pulang Pisau yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka permasalahan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

2.3.1.1 Masalah Infrastruktur Wilayah

- 1) Masih tingginya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak
- 2) Kualitas jalan dan jembatan yang masih rendah belum merata antar tiap kecamatan
- 3) Jaringan irigasi yang masih belum termanfaatkan secara optimal
- 4) Akses air bersih yang masih kecil dan belum merata

2.3.1.2 Masalah Kesehatan

- 1) Belum optimalnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- 2) Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- 3) Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Puskesmas masih rendah.
- 4) Belum Terpenuhinya secara menyeluruh Sarana Fisik dan Sarana Peralatan Kesehatan lainnya di tingkat Puskesmas maupun jejaringnya

2.3.1.3 Masalah Pendidikan

- 1) Rendahnya angka rata-rata lama sekolah
- 2) Rendahnya angka rasio sekolah terhadap murid untuk tingkat pendidikan menengah atas
- 3) Rendahnya angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan menengah atas
- 4) Rendahnya angka partisipasi murni untuk tingkat pendidikan menengah atas

2.3.1.4 Masalah Ekonomi Kerakyatan

- 1) Rendahnya jumlah koperasi aktif
- 2) Belum optimalnya kinerja sistem manajemen usaha koperasi dan UMKM
- 3) Belum optimalnya sistem kelembagaan koperasi dan UMKM
- 4) Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM yang tidak merata
- 5) Akses untuk pemodalan bagi koperasi dan UMKM yang masih terbatas

2.3.1.5 Masalah Pertanian dan Peternakan

- 1) Produktivitas hasil tanaman pangan yang masih rendah.
- 2) Menurunnya populasi ternak sapi
- 3) Rendahnya adopsi dan inovasi teknologi pertanian dalam arti luas
- 4) Masih rendahnya keterampilan/keahlian petani dan petugas

- 5) Belum optimal pemberdayaan kelembagaan petani
- 6) Keterbatasan Infrastruktur sarana dan prasarana Peternakan
- 7) Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian produktif/potensial peruntukan lain
- 8) Lemahnya permodalan petani.
- 9) Belum ada komoditas unggulan daerah di bidang peternakan

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

Tabel 2.12
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
I		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
	a.	Tataran Pengambil Kebijakan			
		Ketentraman dan ketertiban umum daerah	Wajib	Adanya Perda IMB dan kependudukan	Tidak ada masalah
		Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Wajib	Penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja tepat waktu	Tidak ada masalah
		Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Wajib	Kesesuaian prioritas pembangunan	Tidak ada masalah
		Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Wajib	Perda yang ditetapkan	Tidak ada masalah

No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	Tidak ada masalah
		Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Tidak ada masalah
		Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Wajib	Jumlah perda yang dibatalkan	Tidak ada masalah
		Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Wajib	Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemda dalam rangka penyusunan perda	Tidak ada masalah
		Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Wajib	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Informasi tentang dana perimbangan diusahakan agak lambat diterima yg mempengaruhi penganggarannya
		Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Wajib	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD	PAD masih kecil persentasenya terhadap pendapatan dalam APBD
		Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Wajib	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Hasil opini BPK tahun 2016 memperlihatkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat telah berjalan dengan baik

No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Pengelolaan potensi daerah	Wajib	Peraturan Daerah tentang PAD	Peraturan Daerah untuk mengatur pajak dan retribusi daerah baru keluar, diharapkan mampu meningkatkan PAD
		Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Wajib	Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	Inovasi masih terbatas
	b.	Tataran Pelaksana Kebijakan			
		Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	Wajib/pilihan	Program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Secara khusus nomenklatur program mengacu kepada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang masih ada perbedaan nomenklaturnya dengan program nasional
		Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Wajib/pilihan	Jumlah PERDA yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut peraturan Perundangan yang berlaku.	Sudah ditindaklanjuti
		Tingkat capaian SPM	Wajib/pilihan	SPM yang telah dilaksanakan	Masih ada pelayanan yang belum ada payung hukum untuk penerapan SPM
		Penataan kelembagaan daerah	Wajib/pilihan	Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi	Pengisian jabatan merupakan kewenangan pejabat Pembina kepegawaian
		Pengelolaan kepegawaian daerah	Wajib/pilihan	Struktur jabatan yang terisi pada Tahun yang bersangkutan.	Pengisian jabatan merupakan kewenangan pejabat Pembina kepegawaian

No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Perencanaan pembangunan daerah	Wajib/pilihan	Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di SOPD	Dokumen perencanaan di SOPD belum tepat waktu penyusunannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan tentang perencanaan.
		Pengelolaan keuangan daerah	Wajib/pilihan	Anggaran SKPD terhadap total Belanja APBD.	Penetapan pagu anggaran masing-masing SKPD tergantung kepada prioritas program yang dilaksanakannya
		Pengelolaan barang milik daerah	Wajib/pilihan	Ketersediaan kartu inventaris barang atau aset SKPD.	Inventarisasi barang milik daerah masih belum optimal
		Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat	Wajib/pilihan	Jumlah fasilitas/prasarana informasi Papan Pengumuman Pos Pengaduan.	Tidak setiap SKPD memiliki fasilitas/prasarana informasi papan pengumuman
II		Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah			
		Kesejahteraan masyarakat			
		Pelayanan umum	Wajib/pilihan	Tingkat kepuasan pelayanan	Tidak masalah
		Daya saing daerah	Wajib/pilihan	Besarnya minat investasi ke daerah	Tidak masalah
III		Daerah Otonomi Baru			
		Perkembangan penyusunan perangkat daerah	Wajib/pilihan	-	Tidak masalah
		Pengisian personil	Wajib/pilihan	-	Tidak masalah

2.4 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

Sampai dengan tahun 2016, capaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator makro, menunjukkan trend peningkatan. Pencapaian yang cukup baik terutama dari kinerja pembangunan ekonomi. Pada tahun 2015, ekonomi Kabupaten Pulang Pisau tumbuh sebesar 7,8 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi tahun sebelumnya yaitu 7,59 persen. Pertumbuhan tersebut mempengaruhi pada pengurangan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari 6,23 % pada tahun 2009 menjadi 5,65% pada tahun 2015. Sedangkan tingkat pengangguran mengalami peningkatan, dari 2,62 persen pada tahun 2011 menjadi 4,28 persen ditahun 2015 dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2015 mencapai 57.403 orang.

Capaian Kinerja Pembangunan lainnya juga dapat dilihat dari capaian indikator lain antara lain di Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan bidang lainnya. Secara lengkap capaian Indikator-indikator makro pembangunan sebagai capaian kinerja tiap tahun yang terukur sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.13
PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2013 - 2016

No.	Indikator	Kondisi		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Target	Capaian	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bidang Ekonomi dan Sosial						
	Pertumbuhan PDRB (ADHB)	10,78	13,34		13,34		
	Pertumbuhan PDRB (ADHK)	6,79	7,59		7,80		
	Persentase penduduk miskin	5,45	5,35		5,65		
	Angka Pengangguran	2,40	4,28		3,29		
2.	Bidang Pendidikan						
	APK SD/SDLB/MI	105,14	106,53		109,92		
	APK SMP/MTs	92,33	89,04		106,26		
	APK SMA/SMK/MA	52,28	61,96		86,52		
	APM SD/SDLB/MI	91,62	94,05		95,12		

	APM SMP/MTs	74,05	74,59		76,62		
	APM SMA/SMK/MA	39,22	52,42		64,58		
3	Bidang Kesehatan						
	Angka Kematian Bayi	35,00	140,00		161,00		
	Angka Harapan Hidup	5,00	67,64		6,00		
	Persentase Balita Gizi buruk	62,5	64,6		65,3		
	Angka Kematian Ibu	0,00	0,00		0,00		